

# EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN PADA MASYARAKAT MISKIN DI KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA

Rully Sumual<sup>1</sup>, Suraji<sup>2</sup>, Nawawi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sulawesi Utara, Indonesia

<sup>2</sup>Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sulawesi Utara, Indonesia

<sup>3</sup>Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sulawesi Utara, Indonesia

email: [drullysumual@gmail.com](mailto:drullysumual@gmail.com), [suraji1772@gmail.com](mailto:suraji1772@gmail.com)

## RIWAYAT ARTIKEL

Received : 2026-05-17

Revised : 2026-07-04

Accepted : 2026-07-04

## KEYWORDS

Effectiveness, Poverty

Alleviation, Social Assistance

Distribution

## KATA KUNCI

Efektivitas, Penanggulangan

Kemiskinan, Pemberian Bansos

## ABSTRACT

*This study was conducted to determine the effectiveness of poverty alleviation among poor communities in Manado City, as well as to identify the inhibiting factors and the efforts made in overcoming them. This research employed a qualitative descriptive method to collect and analyze data describing the actual conditions in the field. The study involved 9 informants. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used were data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification. The results of the study, based on Duncan's effectiveness theory consisting of: 1) Goal Achievement, 2) Integration, and 3) Adaptation, indicate that the effectiveness of poverty alleviation for poor communities in Manado City can be categorized as fairly effective. This condition is influenced by supporting and inhibiting factors in the implementation of the program. Efforts undertaken to overcome these obstacles include improving the competence of human resources through training programs, conducting continuous socialization, and increasing the budget allocation for poor communities.*

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui : Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan Pada Masyarakat Miskin Di Kota Manado , untuk mengetahui faktor penghambat dan upaya yang dilakukan, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif guna mengumpulkan dan menganalisis data yang menggambarkan fakta di lapangan. Jumlah informan berjumlah 9 orang. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, kesimpulan, dan verifikasi sangat relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian berdasarkan teori efektivitas oleh Duncan, yaitu: 1) Pencapaian Tujuan; 2) Integrasi; dan 3) Adaptasi menunjukkan bahwa : Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan Pada Masyarakat Miskin Di Kota Manado cukup efektif. Hal ini disebabkan adanya faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program ini. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan ialah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan, mengadakan sosialisas secara berkelanjutan serta peningkatan anggaran untuk masyarakat miskin.

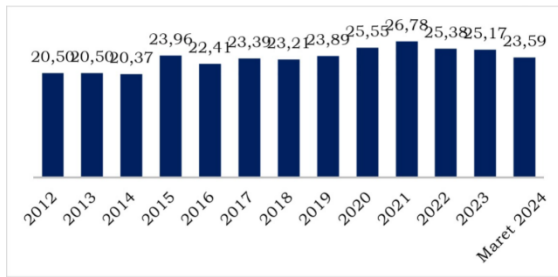
## 1. Pendahuluan

Isu kemiskinan merupakan fenomena krusial yang memengaruhi semua negara dan pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Berbagai langkah pemerintah telah diterapkan untuk memerangi kemiskinan, tetapi hasilnya belum memenuhi harapan. Indonesia berupaya untuk memastikan kesejahteraan seluruh warganya dengan memberikan akses tanpa batas kepada mereka

terhadap sumber daya alam negara. Hal ini diabadikan dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menegaskan mengenai semua sumber daya alam penting adalah milik negara dan dikelola untuk kepentingan rakyat Indonesia. Orang miskin memiliki hak-hak dasar yang sama seperti orang lain. Hak-hak ini pada dasarnya meliputi hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air konsumsi, tanah, lingkungan yang

sehat, perlindungan dari kekerasan, dan Hak Pria dan wanita didorong untuk berkontribusi aktif dalam berbagai bidang kehidupan sosial dan politik.

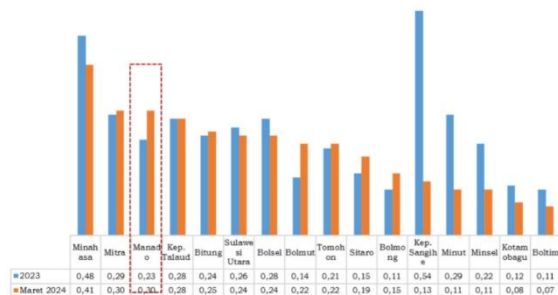
Jumlah Penduduk Miskin Kota Manado Tahun 2012–Maret 2024 (ribu jiwa)



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2024

Data menunjukkan bahwa angka kemiskinan akan meningkat menjadi 25.550 jiwa pada tahun 2020, 26.780 jiwa pada tahun 2021, dan 23.560 jiwa pada tahun 2023 dan 2024. Besarnya angka masyarakat prasejahtera di Kota Manado merupakan masalah yang harus ditangani oleh Pemerintah Daerah Manado. Berikut adalah data lebih lanjut yang membandingkan angka kemiskinan menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan data Maret 2024, dan membandingkan angka kemiskinan untuk kota-kota di seluruh Sulawesi pada tahun 2023:

Grafik Perbandingan Indeks Kritis Kemiskinan Kab/Kota Provinsi Sulut Tahun 2023 dan Maret 2024



Sumber: BPS Kota Manado, 2024

Perkembangan tingkat kemiskinan Kota Manado sampai dengan Maret 2024 berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dapat dilihat pada Gambar berikut :

Rasio penduduk di bawah garis kemiskinan Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2013-Maret 2024 (Persen)



Sumber: BPS Kota Manado, 2024

Tingkat kemiskinan di Kota Manado berfluktuasi antara tahun 2013 dan 2023. Pada tahun 2023,

tingkat kemiskinan adalah 5,79%, dibandingkan dengan 5,85% pada tahun 2022. Angka ini menunjukkan sedikit penurunan sebesar 0,06 poin persentase dibandingkan dengan tingkat kemiskinan 0,36% pada tahun 2022. Tingkat kemiskinan di Kota Manado pada tahun 2023 lebih rendah daripada rata-rata provinsi Sulawesi Utara (7,38%) dan rata-rata nasional (9,36%). Tingkat yang rendah ini menunjukkan bahwa Kota Manado terus melampaui rata-rata provinsi dan nasional.

Berdasarkan data di atas, pemerintah Kota Manado harus mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kemiskinan di Kota Manado. Upaya ini telah dilakukan oleh pemerintah Kota Manado melalui Dinas Pelayanan Sosial dan Pemberdayaan Sosial Manado, tetapi masih belum optimal karena kurangnya efektivitas upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pelayanan Sosial dan Pemberdayaan Sosial Manado. Berdasarkan definisi di atas, penulis memberi judul penelitian ini: "Efektivitas Pemberantasan Kemiskinan di Kalangan Masyarakat Miskin di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara."

Berdasarkan definisi dan judul penelitian, penelitian dapat merumuskan beberapa pertanyaan yang akan menjadi pokok bahasan ini:

- Seberapa efektifkah pemberantasan kemiskinan di kalangan Masyarakat Miskin di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara?
- Apa saja hambatan dan tantangan dalam pemberantasan kemiskinan di kalangan Masyarakat Miskin di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara?
- Bagaimana posisi Dinas Sosial Kota Manado dalam Pemberantasan Kemiskinan di kalangan Masyarakat Miskin di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara?

## 2. Tinjauan Literatur

### a. Efektivitas

Kata "efektif" berasal dari kata bahasa Inggris "effective", memiliki makna berarti keberhasilan, diselesaikan dengan tepat. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa efektivitas ialah manfaat, aktivitas, dan ketepatan dalam situasi tertentu antara orang-orang yang melakukan tugas dan tujuan yang mereka capai.

Gibson, dalam Campbell (2014: 121), Keberhasilan dalam menerapkan metode yang memandang suatu entitas sebagai jaringan kerja yang utuh dan saling berinteraksi, yaitu: (1) seluruh siklus input-proses-output, bukan hanya hasilnya, dan (2) hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya. Berikut ini adalah ukuran umum efektivitas:

- Keberhasilan program
- Keberhasilan tujuan
- pemenuhan capaian program
- Indeks input dan output
- Capaian program secara keseluruhan.

Menurut Richard M. Steers (2015: 53), ukuran efektivitas meliputi:

- 1) Pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan adalah semua proses dalam upaya untuk mencapai tujuan. Untuk memastikan pencapaian besar, diperlukan langkah dan waktu. Untuk mencapai tujuan ini, perlu menetapkan waktu dan target tertentu.
- 2) Integrasi. Integrasi adalah ukuran kemampuan organisasi, yang membutuhkan sosialisasi, saling pengertian, dan komunikasi.
- 3) Adaptabilitas. Adaptabilitas ialah kemampuan sebuah organisasi yang beradaptasi dengan lingkungannya dan merupakan indikator dalam proses perekrutan dan seleksi.

b. Kemiskinan

Konsep indikator kemiskinan yang dijelaskan dalam BAPPENAS bersifat luas dan mencakup berbagai kebutuhan dasar, termasuk: (1) pasokan makanan yang tidak memadai dan di bawah standar; (2) akses minim dan kualitas layanan kesehatan yang buruk; (3) ketidakterjangkauan dan kualitas layanan pendidikan yang buruk; (4) lapangan profesi dan bisnis yang minim; (5) proteksi lahan dari kehilangan kapital bisnis serta ketidaksetaraan upah; (6) akses minim terhadap kawasan pemukiman dan sterilisasi; (7) ketersediaan sempit atas air higienis; (8) keamanan lahan karena kekuasaan dan kendali lahan; (9) kondisi kawasan dan kekayaan alam yang memburuk, beserta jangkauan publik tergolong definit terhadap kekayaan alam hayati; (10) Pengamanan lahan; (11) Derajat keterlibatan angkatan kerja yang rendah; (12) tingkat ketergantungan yang tinggi karena beban rumah tangga yang tinggi; (13) Mismanajemen yang mengakibatkan layanan publik yang tidak efektif dan tidak efisien, korupsi yang meluas, dan tingkat perlindungan sosial yang rendah bagi masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengaplikasikan metode yang mempertimbangkan syarat mutlak untuk menentukan kefakiran. Tingkat kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (2022) adalah sebagai berikut:

1) Penduduk Miskin

Biro Statistik (BPS) menerapkan rancangan potensi untuk pemenuhan kebutuhan vital (pendekatan kebutuhan dasar). Kemiskinan didefinisikan di sini sebagai keterbatasan finansial untuk menyediakan kebutuhan mutlak dasar akan makanan dan barang-barang lainnya, yang ditaksir berdasarkan konsumsi. Suatu populasi dianggap miskin jika pengeluaran bulanan rata-rata per orang berada di bawah garis kemiskinan.

2) Garis Kemiskinan (GK)

Garis kemiskinan menunjukkan hasil dalam rupiah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar bulanan seseorang, termasuk

makanan dan barang-barang lainnya. Garis kemiskinan terdiri dari garis kemiskinan pangan (FPL) dan garis kemiskinan non-pangan (NPL). FPL sesuai dengan Biaya minimal untuk asupan makanan dengan nilai energi 2.100 kkal per hari. Garis kemiskinan non-pangan mencakup pengeluaran minimum untuk barang-barang seperti perumahan, pakaian, kesehatan, dan perawatan kesehatan. Paket makanan dasar mencakup 52 item berbeda (biji-bijian, sayuran akar, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll.).

- 3) Indeks Kemiskinan: Indeks Kemiskinan (P0) menunjukkan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
- 4) Indeks Kesenjangan Kemiskinan  
Indeks Kesenjangan Kemiskinan (P1) mengukur perbedaan rata-rata antara pengeluaran rata-rata per orang miskin dan garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin dekat pengeluaran rata-rata penduduk dengan garis kemiskinan.
- 5) Indeks Kesenjangan Kemiskinan
- 6) Indeks Kemiskinan: Indeks Kesenjangan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran umum tentang distribusi pengeluaran di kalangan orang miskin..

Sejak tahun 2010 dalam Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) telah mengembangkan empat indeks kemiskinan: Indeks Pembangunan Manusia (HDI), Indeks Pembangunan Manusia yang Disesuaikan dengan Ketidaksetaraan (IHDI), Indeks Ketidaksetaraan Gender (GII), dan Indeks Kemiskinan Multidimensi (MPI). Sejak tahun 2010, HDI diukur dengan cara yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun menggabungkan dimensi yang sama: umur panjang dan sehat, akses terhadap pengetahuan, dan standar hidup yang layak, pengukurannya adalah indeks rata-rata geometris yang dinormalisasi untuk setiap dimensi.

Terdapat banyak definisi kemiskinan dalam literatur, yang secara umum dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: kemiskinan absolut, relatif, dan budaya. Orang dianggap sangat miskin ketika pendapatan mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka akan makanan, pakaian, perawatan kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Orang yang dianggap relatif berisiko miskin hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih belum mencapai kemampuan finansial komunitas mereka.

Menurut Chambers, empat bentuk kemiskinan dapat dibedakan: Pertama, kemiskinan absolut: Hal ini terjadi saat pendapatan turun Berada di bawah standar kelayakan hidup minimum atau tidak memiliki cukup penghasilan untuk menanggung biaya makanan, pakaian, perawatan kesehatan,

perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk hidup dan bekerja. Kedua, kemiskinan relatif: Ini dihasilkan dari kebijakan pembangunan yang tidak menguntungkan semua anggota masyarakat dan menyebabkan ketidaksetaraan pendapatan. Ketiga, kemiskinan budaya: Ini menunjukkan sikap individu atau masyarakat. Berdasarkan Faktor kultural yang ditandai dengan kurangnya motivasi untuk memperbaiki kualitas hidup, kemalasan, pemborosan, dan kurangnya kreativitas meskipun mendapat dukungan eksternal. Keempat, kemiskinan struktural: suatu kondisi kemiskinan yang diakibatkan oleh keterbatasan Keterjangkauan fasilitas dan aset dan berlangsung di tengah tatanan sosial-budaya dan konstelasi politik yang tidak berkontribusi pada pengurangan kemiskinan tetapi seringkali memperburuknya. Dari perspektif sosial, mengukur garis kemiskinan dalam suatu masyarakat tertentu masih sulit, tetapi Dapat diperkirakan melalui pendekatan teoritis dengan memakai indikator ekonomi dan tiga pendekatan: mode pembuatan, penerimaan finansial, dan pengeluaran dana.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Pengentasan Kemiskinan, kemiskinan merupakan masalah nasional yang membutuhkan langkah dan pendekatan sistematis, terintegrasi, dan komprehensif untuk mengurangi beban dan menjamin Pemenuhan hak-hak asasi warga negara yang diwujudkan melalui pelaksanaan pembangunan yang menyeluruh, berkeadilan, dan berkesinambungan, sehingga mereka dapat hidup bermartabat. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Program Percepatan Pengentasan Kemiskinan, program perlindungan sosial harus diintensifkan.

Pengentasan masyarakat prasejahtera merupakan serangkaian strategi dan tindakan terencana yang disusun bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendongkrak kesejahteraan rakyat, yang dilaksanakan secara sistematis, dengan perencanaan, dan bekerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat setempat. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

### 3. Metode

Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Sumber Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya oleh pihak yang melakukan penelitian atau pengumpulan data., sedangkan sumber sekunder adalah sumber data yang tidak tersedia secara langsung bagi pengumpul data. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Sembilan informan dipilih, termasuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Sekretaris Dinas, Kepala Dinas, Kepala Unit, dan anggota masyarakat.

### 4. Hasil dan Pembahasan

Kota Manado adalah salah satu dari 70 provinsi/kota yang berpartisipasi dalam bagian dalam program SLRT dan salah satu dari delapan provinsi/kota yang telah mengembangkannya secara mandiri menggunakan anggaran daerah. Program SLRT dan Yayasan PUSKESOS bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan perlindungan sosial yang terintegrasi dan komprehensif. Dinas Pelayanan Sosial Kota Manado, yang memerangi kemiskinan, menawarkan dua layanan utama yang terkait langsung dengan masyarakat:

#### 1. DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) .

Individu yang berhak menerima manfaat dari anggaran daerah dan nasional wajib mendaftar di Database Terpadu (BDT) atau Database Bantuan Sosial Terpadu (DTKS). DTKS adalah database bantuan sosial terpadu yang mencakup penerima manfaat sosial (PPKS), penerima bantuan sosial dan dukungan untuk kemandirian, serta sumber daya dan potensi bantuan sosial (PSKS). DTKS mencatat 40% penduduk dengan kebutuhan bantuan sosial terendah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas identifikasi penerima manfaat program perlindungan sosial. DTKS berkontribusi pada perencanaan program dan mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya yang didistribusikan untuk program perlindungan sosial. Tujuan DTKS adalah untuk memastikan bantuan sosial yang tepat sasaran, terintegrasi, dan berkelanjutan yang diberikan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pasal 2, ayat 1, menetapkan: Pasal 2 Peraturan Menteri Kemasyarakatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan terpadu data bantuan sosial menetapkan bahwa data bantuan sosial (SAD) meliputi: – penerima bantuan sosial (SAD), seperti... B. anak-anak miskin dan pengungsi; – penerima program bantuan dan dukungan sosial, seperti keluarga penerima manfaat dari program "Keluarga Harapan" (PKH) dan "Nutrisi Dasar" (PKS); – calon dan penerima bantuan sosial saat ini, seperti pekerja sosial tingkat kabupaten (SSK) dan lembaga bantuan sosial (LKS). Data bantuan sosial (SAD) dikumpulkan melalui Sistem Informasi Bantuan Sosial Terpadu Generasi Baru (SIKS-NG). SIKS-NG adalah sistem TI yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu akumulasi, pengolahan, penyampaian, dan pengarsipan SAD, dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, yang sedang diimplementasikan secara bertahap dan berkelanjutan.

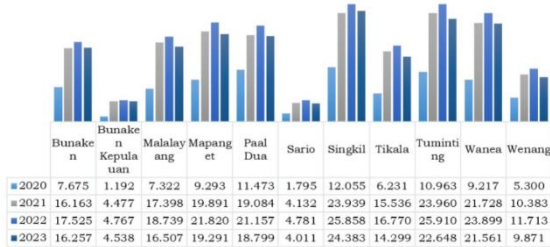
Menurut Data Kesejahteraan Terpadu Kota Manado (DTKS), DTKS Kota Manado memiliki persentase penduduk terendah yaitu 40%, yang berjumlah 172.165 jiwa pada tahun 2023. Lima distrik dengan populasi terbesar di DTKS adalah: Distrik Singkil dengan 24.383 jiwa (14,16%), Distrik Tuminting dengan 22.648 jiwa (13,15%), Distrik Wanea dengan 21.561 jiwa (12,52%), Distrik Mapanget dengan 19.291 jiwa (11,20%),

dan Distrik Paal Dua dengan 18.799 jiwa (10,92%). Distrik Sario memiliki persentase penduduk terendah di DTKS, yaitu 4.011 jiwa (2,33%).

Berdasarkan data kesejahteraan sosial komprehensif (DTKS) Kota Manado untuk tahun 2020-2023, terjadi peningkatan DTKS dari tahun 2020 menjadi 82.516, yang kemudian meningkat menjadi 192.939 pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, angka tersebut menurun menjadi 172.165.

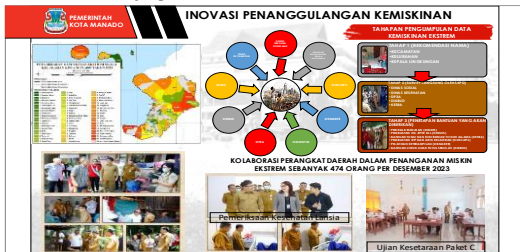
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per Kecamatan Kota Manado

Tahun 2020 – 2023



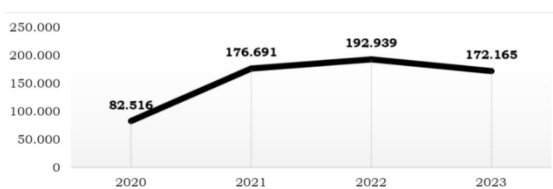
Sumber. Dinas Sosial Manado, 2024

Inovasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023



Sumber: Bapelitbang Kota Manado, 2024

Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Manado Tahun 2020 – 2023



Proses pengelolaan DTKS mencakup fase pengumpulan data, verifikasi dan konfirmasi, berbagi, dan pemanfaatan. Penggarapan data selama fase pengumpulan, verifikasi, dan konfirmasi dilakukan secara independen oleh Departemen Kesejahteraan Sosial, khususnya oleh Unit Pengumpulan dan Pengolahan Data Kemiskinan dan PMKS, bekerja sama dengan mitra seperti TSKS, SLRT, staf PMKS (termasuk KUBE), staf untuk lansia dan penyandang disabilitas, dan lembaga yang mengelola urusan pemerintahan di bidang statistik.

Kegiatan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin:

a. Memfasilitasi warga miskin ekstrim yang produktif untuk bisa bekerja atau memberikan pekerjaan.

Diberikan kepada keluarga memiliki syarat:

- 1) Tingkat pendidikan tertinggi yang dapat dimiliki seorang ayah adalah tidak bersekolah atau tidak menyelesaikan sekolah dasar.
- 2) Asal pendapatan kepala rumah tangga adalah petani dengan lahan pertanian hingga 500 m<sup>2</sup>, pekerja pertanian, nelayan, pekerja konstruksi, pekerja perkebunan, atau karyawan lain yang pendapatannya kurang dari PLN 600 per bulan.
- 3) Tabungan/aset uang senilai minimal 500.000, seperti kendaraan bermotor, emas, ternak, perahu motor, atau barang investasi yang lain dibeli secara kredit atau tanpa pembiayaan, tidak diperbolehkan.

Kegiatan di bagian bantuan sosial dan perlindungan sosial:

- a. KKS
- b. PKH
- c. KIP
- d. Subsidi Listrik,
- e. Subsidi (LPG)
- f. KIS
- g. Bantuan Lansia
- h. Bantuan Disabilitas

Faktor-faktor yang memfasilitasi dan menghambat usaha pemerintah daerah dalam memerangi kemiskinan di Manado :

a. Faktor Pendukung

Implementasi perencanaan pengentasan kemiskinan di Manado terkait erat dengan faktor-faktor pendukung. Studi ini mengidentifikasi faktor-faktor berikut sebagai faktor yang mendukung pelaksanaan program ini di Manado:

- 1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah Manado bekerja sama erat untuk memberikan bantuan sosial yang efektif, dengan harapan dapat memutus siklus kemiskinan di tingkat mereka yang paling membutuhkan, dimuka dari keluarga, lingkungan, dan distrik.
- 2) Koordinasi yang efektif antara otoritas publik (lembaga jaminan sosial) dan entitas yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan sosial sangat penting. Entitas-entitas ini meliputi otoritas daerah serta kelompok kepentingan dan perangkat di kecamatan serta kelurahan. Melalui adanya koordinasi dari aktor-aktor terkait maka program ini akan berjalan dengan baik. karena itu

dukungan dari stakeholder inilah yang diharapkan akan cepat dalam menekan laju angka kemiskinan serta lebih mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

- 3) Adanya pemberdayaan dan pengembangan SDM keluarga kurang dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat sehingga status dari penduduk miskin berubah menjadi keluarga tidak miskin atau keluarga sejahtera.

#### b. Faktor Penghambat

Implementasi jaminan sosial menghadapi beberapa tantangan: akses yang tidak merata terhadap layanan kesehatan, pemahaman yang buruk tentang manfaat sosial, terutama di sektor informal, yang menyebabkan layanan yang tidak memadai, dan kontribusi yang rendah, yang mengecualikan orang dari penerimaan manfaat dan merusak stabilitas dana jaminan sosial. Tantangan dalam implementasi bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi meliputi sifat bantuan sosial yang terfragmentasi dan integrasinya yang tidak lengkap dengan pemberdayaan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh penggunaan data yang terfragmentasi yang tidak terintegrasi di berbagai sektor, program, dan wilayah, serta tidak diperbarui secara sistematis. Hal ini menyebabkan tingkat kesalahan yang ditargetkan tinggi dan mengurangi efektivitas layanan sosial pemerintah. Lebih lanjut, implementasi bantuan sosial belum cukup adaptif untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana alam, bencana non-alam, dan perubahan iklim. Dampak bantuan sosial masih rendah dan sistem belum cukup menjangkau kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lansia. Faktor-faktor yang menghambat pengurangan kemiskinan di kota Manado adalah :

- 1) Kurangnya pemahaman dikalangan masyarakat miskin mengenai hukuman jika tidak mematuhi kewajiban atau perjanjian yang ditetapkan baik syarat administrasi maupun persyaratan teknis lainnya
- 2) Kurangnya dukungan finansial bisa membahayakan pencapaian tujuan. Keterbatasannya dukungan finansial mampu menentukan keberhasilan tujuan. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial, proses pendanaan ialah hal terpenting sebagai penentu keberhasilan. Disisi itu pemodal juga menjadi hal penting sehingga diperlukan pengurusan maupun pendampingan yang baik supaya dalam pemodalannya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal penggunaan anggaran bantuan sosial perlu adanya evaluasi dan monitoring yang tepat,

pemberian bantuan yang tepat sasaran, sehingga pelaksanaan bantuan tersebut dapat mengurangi angka kemiskinan di Kota Manado.

- 3) Kekurangan tenaga kerja terampil menghambat pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan pembangunan masyarakat melalui koperasi untuk kaum miskin (KUBE-FM). Tenaga kerja terampil merupakan faktor kunci keberhasilan program-program tersebut. Tingginya angka urbanisasi di Kota Manado, adanya penduduk miskin yang masuk dan tinggal di Kota Manado salah satu sebab sehingga angka kemiskinan tetap tinggi. Masalah pengangguran dan pendapatan yang rendah menjadi faktor penghambat utama dalam pengentasan kemiskinan.

#### Upaya Untuk Mengatasi Hambatan

Upaya yang dilakukan oleh dinas sosial dan dinas pengembangan masyarakat bekerja sama dengan pemerintah kota Manado, provinsi Sulawesi Utara, untuk memerangi kemiskinan di masyarakat kurang mampu di kota Manado dapat diringkas sebagai berikut :

- a. Terus melaksanakan berbagai program perlindungan sosial, seperti PKH, kupon makanan pokok, dan distribusi subsidi, serta melakukan upaya lebih lanjut untuk lebih menargetkan program perlindungan sosial.
- b. Intervensi yang diambil oleh pemerintah kota manado untuk mendukung warga yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, kolaborasi dengan sektor lain seperti: pemberian bantuan tunai sebesar rp400.000/orang/bulan, pemeriksaan kesehatan bagi lansia miskin ekstrem , pembuatan KIS, BNPT, perekaman KTP-EL, pelatihan keterampilan, pemberian pendidikan kesetaraan bagi anak putus sekolah usia produktif, pemberian peralatan dan seragam sekolah, pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial, memfasilitasi warga miskin ekstrem yang produktif untuk bisa bekerja, pemberian modal usaha dan bantuan perahu, pembangunan rumah tinggal layak huni bagi keluarga miskin ekstrem di Kelurahan Tongkaina Kecamatan Bunaken dan Kombos Barat Kecamatan Singkil, pembuatan sumur bor air bersih di Kecamatan Bailang, Kecamatan Bunaken, Kecamatan Tuminting, Bantuan UMKM di Kecamatan Bunaken Kepulauan.
- c. Mendorong konvergensi komplementaris program jaminan sosial. Penguatan serta mekanisme graduasi dari kemiskinan melalui sinergi dengan program pemberdayaan. Pembenahan desain dan kualitas implementasi perlindungan sosial menjadi lebih efektif. Memperkuat perlindungan sosial sepanjang hidup untuk kelompok rentan serta mengantisipasi *ageing population*, Mendorong

skema perlinsos adaptif untuk mengantisipasi risiko kritis.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan riset dan diskusi, dapat diputuskan bahwasanya upaya yang dilakukan oleh Kementerian Urusan Sosial dan Departemen Perlindungan Sosial untuk mengurangi kemiskinan di Manado, berkolaborasi dengan instansi terkait, secara umum telah membuahkan hasil. Pelaksanaan beragam program bantuan sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial menunjukkan komitmen tulus pemerintah daerah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan program-program bantuan tersebut, yang menjangkau masyarakat termiskin sesuai dengan tujuannya.

Fungsi ini juga dapat dilihat melalui pendekatan Duncan terhadap teori fungsi Steers (1985), yang mencakup dimensi pembelajaran tujuan, integrasi, dan adaptasi. Dalam dimensi pembelajaran tujuan, Dinas Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat Kota Manado dianggap mampu melaksanakan program pengentasan kemiskinan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Dari perspektif integrasi, terdapat penyelarasan dan kerja sama antara pemerintah kota dan lembaga terkait untuk melaksanakan program pengentasan kemiskinan. Sementara itu, dalam dimensi adaptasi, pemerintah kota berupaya mengadaptasi program tersebut terhadap kondisi sosial masyarakat dan gerakan pembangunan di Kota Manado.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Salah satunya adalah rendahnya pemahaman sebagian masyarakat miskin terhadap kewajiban dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam menerima bantuan sosial, baik yang berkaitan dengan persyaratan administrasi maupun ketentuan teknis lainnya. Selain itu, proses pengelolaan pendanaan dan penggunaan anggaran bantuan sosial masih memerlukan evaluasi dan monitoring yang lebih optimal agar bantuan yang diberikan benar-benar efektif serta mampu memberikan dampak nyata terhadap pengurangan angka kemiskinan.

Permasalahan lain yang turut memengaruhi tingginya angka kemiskinan di Kota Manado adalah tingginya tingkat urbanisasi. Masuknya penduduk dari daerah lain untuk menetap di Kota Manado menyebabkan jumlah penduduk miskin terus bertambah. Kondisi tersebut diperparah oleh masalah pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, sehingga menjadi hambatan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan secara menyeluruh.

Berdasarkan temuan studi ini, para penulis merekomendasikan agar Badan Pengembangan Sosial dan Masyarakat Kota Manado lebih memperkuat kapasitas kelembagaannya dan meningkatkan kualitas sumber daya yang dialokasikan untuk implementasi langkah-langkah

pengurangan kemiskinan. Penguatan ini harus disertai dengan peningkatan pendanaan dan peningkatan kerja sama antarlembaga untuk memastikan respons terbaik terhadap masalah sosial, terutama mengingat peningkatan pembangunan sosial yang diakibatkan oleh urbanisasi Manado.

Pemerintah daerah juga diharapkan tetap melanjutkan program-program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan berbagai bentuk subsidi sosial lainnya dengan terus melakukan perbaikan data penerima bantuan. Perbaikan sasaran program sangat penting bertujuan bantuan yang diberikan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan dan mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Selain itu, perlu pembaruan mekanisme pengelolaan administrasi dan keuangan program bantuan sosial supaya pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efektif dan tepat waktu. Evaluasi dan pemantauan terhadap penggunaan anggaran harus dilakukan secara teratur untuk menetapkan seluruh program berjalan sesuai tujuan, transparan, dan manfaatnya nyata bagi masyarakat miskin di Kota Manado.

## 6. Daftar Pustaka

### Buku

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2022). Modul 11: Sistem informasi keluarga (SIGA). Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial. (2023). Kebijakan kependudukan 2020–2050. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial. (2023). Penduduk berkualitas menuju Indonesia emas. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mullins, L. J. (2005). *Management and organizational behavior* (7th ed.). Prentice Hall.
- Prijatni, I., & Rahayu, S. (2016). *Kesehatan reproduksi dan keluarga berencana*. Alfabeta.
- Simangunsong, F. (2017). *Metode penelitian pemerintahan*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

### Journal Artikel

- Agussalim, A., Nursini, N., Suhab, S., Kurniawan, R., Samir, S., & Tawakkal, T. (2024). The path to poverty reduction: How do economic growth and fiscal policy influence poverty through inequality in Indonesia? *Economies*, 12(12).

- Anam, C., Plaček, M., Valentinov, V., & Del Campo, C. (2023). Village funds and poverty reduction in Indonesia: New policy insight. *Discover Global Society*, 1, Article 14.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). [SAGE Publications].
- Cwiek, M., Maj-Waśniowska, K., & Stabryła-Chudzio, K. (2021). Assessment of poverty by municipalities in the context of population ageing—The case of Małopolskie Voivodeship. *Sustainability*, 13(5).
- Hu, Z., & Xu, J. (2025). *How does the risk of returning to poverty emerge among poverty-alleviated populations in the post-poverty era? A livelihood space perspective. Sustainability*, 17(11), 13-15.
- Iriqat, I., & Bawab, I. (2025). The role of government policies in combating poverty rates as one of the 2030 Sustainable Development Goals in Palestine. *Sustainability*, 17(15), 6-7.
- Rahma, A., Lestari, D. A., Nasiroh, R. A., & Afif, A. (2025). Menggali akar permasalahan: Kajian mendalam terhadap data kemiskinan dan mekanisme bantuan sosial. Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara, 1(3), 192–198. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i3.93>
- Wang, B., & Deng, W. (2023). *Fiscal decentralization and county natural poverty: A multidimensional study based on a BP neural network. Sustainability*, 15(18), 10-20.
- Zheng, M., Li, X., Qin, Z., & Sohail, M. T. (2023). Examining the impact of fiscal resources on anti-poverty expenditure: Evidence from China. *Sustainability*, 15(5).
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Fakir Miskin dan Anak-Anak Terlantar.
- Buku**
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2022). Modul 11: Sistem informasi keluarga (SIGA). Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial. (2023). Kebijakan kependudukan 2020–2050. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial. (2023). Penduduk berkualitas menuju Indonesia emas. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Kuncoro, A., & Harmadi, S. H. B. (Eds.). (2015). *Perkembangan demografi dan kaitannya dengan pembangunan*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mullins, L. J. (2005). *Management and organizational behavior* (7th ed.). Prentice Hall.
- Prijatni, I., & Rahayu, S. (2016). *Kesehatan reproduksi dan keluarga berencana*. Alfabeta.
- Simangunsong, F. (2017). *Metode penelitian pemerintahan*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Artikel Jurnal**
- Agussalim, A., Nursini, N., Suhab, S., Kurniawan, R., Samir, S., & Tawakkal, T. (2024). The path to poverty reduction: How do economic growth and fiscal policy influence poverty through inequality in Indonesia? *Economies*, 12(12).
- Anam, C., Plaček, M., Valentinov, V., & Del Campo, C. (2023). Village funds and poverty reduction in Indonesia: New policy insight. *Discover Global Society*, 1, Article 14.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). [SAGE Publications].
- Cwiek, M., Maj-Waśniowska, K., & Stabryła-Chudzio, K. (2021). Assessment of poverty by municipalities in the context of population ageing—The case of Małopolskie Voivodeship. *Sustainability*, 13(5).
- Hu, Z., & Xu, J. (2025). *How does the risk of returning to poverty emerge among poverty-alleviated populations in the post-poverty era? A livelihood space perspective. Sustainability*, 17(11), 13-15.
- Iriqat, I., & Bawab, I. (2025). The role of government policies in combating poverty rates as one of the 2030 Sustainable Development Goals in Palestine. *Sustainability*, 17(15), 6-7.
- Rahma, A., Lestari, D. A., Nasiroh, R. A., & Afif, A. (2025). Menggali akar permasalahan: Kajian mendalam terhadap data kemiskinan dan mekanisme bantuan sosial. Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara, 1(3), 192–198. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i3.93>

- Wang, B., & Deng, W. (2023). *Fiscal decentralization and county natural poverty: A multidimensional study based on a BP neural network*. *Sustainability*, 15(18), 10-20.
- Zheng, M., Li, X., Qin, Z., & Sohail, M. T. (2023). Examining the impact of fiscal resources on anti-poverty expenditure: Evidence from China. *Sustainability*, 15(5).

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin  
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan  
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.  
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.  
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Fakir Miskin dan Anak-Anak Terlantar.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).